

Komitmen Menyumbangkan Jiwa dan Raga dalam Komunikasi Pembangunan

Arif Widodo

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP Angkatan V

Email : asiana_widodo@yahoo.com

Abstract :

All components of society Kebumen make a joint commitment on Thursday, May 17, 2012. Commitment stating able to donate and soul to make the Kebumen Beriman it known to stakeholders and clergy - to participate affixing signature. However, when presented to local government, it was not signed by the Regent Kebumen H Buyar Winarso SE. Is it not agreed commitments Kebumen regency? Given all this, tend to accentuate SKPD egosektoral and individualism. Also less professional and proportionate in performing duties and functions. While the length of the shift Beriman of Bersih, Indah, Manfaat, Aman and Nyaman being Diberi, and Aman. Suggested, the commitment was further publicized to all Indonesian people, either through the media or other media. And, a copy of an affidavit was submitted to the Governor of Central Java and the President of the Republic of Indonesia.

Keywords: *commitment, faith, publications*

Abstraksi :

Segenap komponen masyarakat Kebumen membuat komitmen bersama pada Kamis, 17 Mei 2012. Komitmen yang menyatakan sanggup menyumbangkan jiwa dan raga untuk mewujudkan Kebumen Beriman itu diketahui oleh para pemangku kepentingan dan alim ulama – dengan ikut membubuhkan tandatangan. Namun, saat disodorkan kepada Pemkab, ternyata tidak ditandatangani Bupati Kebumen H Buyar Winarso SE. Apakah komitmen tersebut tidak disepakati Pemkab Kebumen? Mengingat selama ini, SKPD cenderung lebih menonjolkan egosektoral dan individualisme. Juga kurang profesional dan proporsional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sementara kepanjangan Beriman mengalami pergeseran dari Bersih, Indah, Manfaat, Aman dan Nyaman menjadi Diberi, lalu Aman. Disarankan, adanya komitmen bersama tersebut dipublikasikan lebih lanjut ke seluruh masyarakat Indonesia, baik melalui media massa maupun media lainnya. Dan, salinan surat pernyataan tersebut diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Presiden Republik Indonesia.

Kata Kunci: *komitmen, beriman, publikasi*

Pendahuluan

Pada awal masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia, paradigma pembangunan yang diterapkan adalah apa yang disebut modernisasi. Saat itu, konsep modernisasi didengungkan pemerintah dan dijadikan konsep dasar pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Hal tersebut berlangsung hingga menjelang berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru.

Oleh karena pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial terencana yang berlangsung melalui proses-proses komunikasi, maka konsep modernisasi tersebut akan berkaitan dengan perspektif komunikasi. Modernisasi menyangkut proses perkembangan serta perubahan individu dan masyarakat, sedangkan masyarakat terbentuk oleh adanya komunikasi antar individu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadinya modernisasi berlangsung melalui proses komunikasi. Seperti pendapat Koentjaraningrat (dalam Effendi, 2001) yang mengatakan bahwa modernisasi dapat dilaksanakan dengan memberikan contoh, persuasi, penerangan, dan pendidikan. Proses pemberian contoh, persuasi, penerangan, dan pendidikan itu akan berlangsung melalui proses komunikasi.

Namun konsep-konsep pembangunan saat ini pada dasarnya masih bersifat materialistik karena yang dipersoalkan hanya terbatas pada persoalan materi yang mau dihasilkan dan yang mau dibagi (Waskita, 2005). Sebagai entitas Negara, pembangunan di Kebumen juga demikian, – meskipun kabupaten tersebut mengusung slogan beriman sebagai landasan pembangunan daerah. Dalam (Wikipedia Bahasa Indonesia), disebutkan bahwa makna iman, asal kata dari beriman, mengalami pergeseran dari pandangan dan sikap hidup menjadi percaya.

Pemahaman pembangunan di sini tentu saja bukan “pembangunan konvensional” seperti yang dianggap masyarakat selama ini yaitu pendirian gedung atau jembatan. Proses pembangunan masa kini, tempat media memegang peranan yang penting, dimaksudkan lebih banyak pada peningkatan pembangunan kapasitas dan kemampuan intelektual atau partisipasi politik masyarakat. Disukai atau tidak, perubahan sosial pada akhirnya mengubah nilai-nilai tradisional, norma-norma dan kepercayaan masyarakat. Langkah ini bergantung pada bagaimana masyarakat yang “kuat” memegang nilai-nilai budaya mereka (Soemirat, 2006: 69).

Pembangunan fisik, seperti pondok pesantren, madrasah, masjid serta mushola di Kebumen me-

mang terlihat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun juga tampak menonjol pada perkara perceraian, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta kasus judi dan asusila. Berikut tabel data-datanya:

Tabel 1
Data Perkembangan Pondok Pesantren, Madrasah, Perguruan Tinggi Islam, Masjid, Mushola, dan Jamaah Haji Tahun 2009 s/d 2011 di Kabupaten Kebumen

No	Jenis	Tahun		
		2009	2010	2011
1	Pondok Pesantren	143 unit	160 unit	167 unit
	- Ustadz	1.240 orang	1.206 orang	1.344 orang
	- Santri	15.365 orang	17.760 orang	17.109 orang
2	RA	81 unit	83 unit	89 unit
	- Guru	247 orang	248 orang	270 guru
	- Siswa	2.450 anak	2.446 anak	2.729 anak
3	MI	102 unit	103 unit	104 unit
	- Guru	990 orang	986 orang	1.063 orang
	- Siswa	13.545 anak	13.537 anak	14.759 anak
4	MTs	80 unit	80 unit	82 unit
	- Guru	1.548 orang	1.640 orang	1.757 orang
	- Siswa	19.465 anak	19.407 anak	18.570 anak
5	MA	21 unit	22 unit	22 unit
	- Guru	387 orang	468 orang	555 orang
	- Siswa	3.584 anak	4.121 anak	4.847 anak
6	STAINU			
	- Dosen	57 orang	57 orang	57 orang
	- Mahasiswa	150 orang	170 orang	1.800 orang
7	Masjid	1.304 unit	1.324 unit	1.355 unit
8	Mushola	3.652 unit	3.718 unit	3.739 unit
9	Jamaah Haji	1.163 orang	1.095 orang	1.178 orang

Sumber: Kantor Kemenag Kabupaten Kebumen

Tabel 2
Data Perkara Perceraian dan KDRT
Tahun 2009 s/d 2011 di Kabupaten Kebumen

Tahun	Perceraian	KDRT
	Jumlah	Jumlah
2009	2.047 perkara	86 laporan
2010	2.029 perkara	70 laporan
2011	1.633 perkara	100 laporan

Sumber: Suara Merdeka dan Indipt

Tabel 3
Data Kasus Perjudian dan Asusila
Tahun 2009 s/d 2011 di Kabupaten Kebumen

Tahun	Judi		Asusila	
	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
2009	34	34	24	23
2010	33	31	19	16
2011	115	116 (1 kasus tahun sebelumnya)	30	23

Sumber: Polres Kebumen

Dari data diatas menunjukkan bahwa gencarnya pembangunan fisik ternyata belum diimbangi dengan pembangunan mental spiritual pada masyarakatnya. Terlebih, dalam penanganan masalah yang dilakukan Pemkab Kebumen acapkali memunculkan fitnah. Seperti penggunaan salinan amar putusan Pengadilan Negeri (PN) Kebumen Nomor 13/Pdt.G/2004/PN.Kbm untuk menjelaskan masalah pemberhentian Sekretaris Desa (Sekdes) Jatisari Kecamatan/Kabupaten Kebumen atas nama Mahrup. Padahal, Mahrup tidak pernah mengajukan gugatan atas pemberhentiannya tersebut, baik melalui PN Kebumen maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Dan, PN Kebumen melalui surat Nomor W12-U13/983/PDT.04.01/V/2012 tanggal 23 April 2012 justru menjelaskan bahwa amar putusan nomor 13/Pdt.G/2004/PN.Kbm merupakan perkara perceraian antara Laurentia Henny Lannywati Hadi Wibowo sebagai penggugat melawan Koni Chandra Harsono. Kondisi tersebut jelas mengoyak jiwa dan sanubari masyarakat.

Perjalanan mengusung slogan beriman yang terseok-seok tersebut akhirnya berhasil mengukir sejarah baru. Kali ini bukan datang dari penguasa daerah, melainkan dari segenap komponen masyarakat

Kabupaten Kebumen dengan membuat komitmen bersama.

Komitmen *Soekidjan, 2009* (dalam www.repository.usu.ac.id) adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi.

“Dengan Rahmat Allah SWT, kami segenap komponen masyarakat Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sanggup menyumbangkan jiwa dan raga untuk mewujudkan Kebumen Beriman”.

Pernyataan tersebut ditandatangani Presidium Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Mustika Aji, Ketua Bina Bangun Generasi (BBG) Wawan Kurniawan, Ketua Forum Komunikasi Konsultasi Keamanan dan Ketertiban Urut Sewu Kebumen (FK4UK) Martidjo, Ketua Forum Paras Giri Aji (FPGA) Gunung Wuryanto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen H Suprpto HS dan Pasi Intel Kodim 0709 Kebumen Kapten Arh M Kholiludin.

Formasi menangani pemberdayaan masyarakat desa serta mencermati perencanaan pembangunan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan BBG fokus pada pembinaan dan pengembangan generasi penerus bangsa. Wilayah garapan masing-masing Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut se-Kabupaten Kebumen, sedangkan FPGA hanya wilayah utara (pegunungan) dan FK4UK wilayah selatan (pantai), mulai dari ujung timur hingga barat Kebumen. Sedangkan Kholiludin yang mengawal perjalanan Pemkab dalam mengusung slogan beriman, dan Suprpto, politisi Partai Golkar yang berpengalaman menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kebumen selama 25 tahun, mendorong adanya kesepakatan bersama tersebut.

Para pemangku kepentingan dan alim ulama yang mengetahui komitmen bersama itu pun ikut menandatangani. Dari mulai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kebumen Duta Baskara SH MH, Ketua Pengadilan Agama (PA) Kebumen Drs M Tahrir, Kajari Kebumen Drs Muhammad Naim SH, Kapolres Kebumen AKBP Heru Trisasono SIK MSi, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kebumen Drs Masmin MAg, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kebumen Kiai H Nurshodiq, Dandim 0709 Kebumen Letkol Inf Dany Rakca Andalasawan SAP dan Pembina Combination Seni Ilmu Hikmah Singa Putih Ma’la Asyadul Usudi Nurriil Barril Bahr, M Ali Masngudi.

Keberadaan Ali Masngudi yang oleh sebagian orang dianggap masih asing itu justru penting, mengingat beliau merupakan Penasihat Spiritual Presiden. Sejak tahun 1974, Masngudi tinggal di Istana Negara Jakarta. Hingga sebelum pecah reformasi, beliau memilih kembali ke Kebumen dan mendirikan Perguruan Ilmu Hikmah Singa Putih. Selama di Kebumen, Masngudi masih intens mengikuti pertemuan dengan Penasihat Presiden lainnya maupun dengan Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres), baik pada masa Presiden BJ Habibie, Kiai H Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati Soekarno Putri maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun, komitmen bersama yang sudah resmi distempel dan ditandatangani segenap komponen masyarakat dan pihak terkait serta alim ulama di Kebumen itu tidak ditandatangani Bupati Buyar Winarso. Padahal, Pemkab sendiri – sejak diberlakukannya UU 22/1999 sebagaimana telah direvisi dengan UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang lebih populer dengan UU Otonomi Daerah (Otda), – menjadikan slogan beriman sebagai landasan pembangunan daerah. Slogan beriman pun gencar didengung-dengungkan melalui media milik Pemkab. Selain melalui Ratih TV – sejak berdiri pada tanggal 12 Mei 2003, juga melalui Radio In FM. Bahkan website dengan alamat www.kebumenkab.go.id dinamai “Kebumen Beriman”. Lagu yang kerap digunakan untuk mengisi kegiatan ibu-ibu PKK dan Dharma Wanita juga bertema “Kebumen Beriman”. Dan, gapura masuk di perbatasan Kebumen – Purworejo dan Kebumen – Cilacap pun terpampang tulisan “Kebumen Beriman”.

Karena itu, tidak adanya tandatangan Bupati Buyar Winarso bisa dijadikan gambaran bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab cenderung lebih menonjolkan egosektoral dan individualisme. Masalah yang menunjukkan adanya “kebobrokan” Pemkab Kebumen itu pun diungkapkan dalam pengantar surat pernyataan bersama tersebut. Pemkab juga dinilai kurang profesional dan proporsional dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya. Sementara Beriman yang memiliki kepanjangan Bersih, Indah, Manfaat, Aman, dan Nyaman, mengalami pergeseran menjadi Diberi, lalu Aman. Jadi, konsep pembangunan non materialistik (beriman) itu justru cenderung digunakan Pemkab untuk kepentingan materialistik. Hal itu memunculkan pertanyaan terkait efektivitas komitmen bersama segenap komponen masyarakat yang sanggup menyumbangkan jiwa dan raga itu, apakah mampu mewujudkan Kebumen Beriman.

Pembahasan

Konsep Penyadaran

Komitmen bersama segenap komponen masyarakat Kebumen dalam implementasi komunikasi pembangunan itu, lebih tepatnya merupakan konsep penyadaran. Konsep tersebut dapat dilihat dari pandangan Freire (1994) terkait konsep ‘*Another Development*’ seperti dikutip oleh Nasution (1988) dari berbagai sumber (Bennet, 1977; Chape1, 1980; Galtung, 1980; Peroux, 1983; Rist, 1980 dan Todaro, 1977). Menurut Freire, pemberdayaan individu masyarakat dapat dilakukan melalui proses penyadaran pada mereka terhadap situasi dan kondisi lingkungan, kebutuhan, keinginan, dan kemampuan. Proses penyadaran tersebut harus dilakukan melalui proses dialog. Sedangkan proses dialog merupakan proses komunikasi dua arah (*two way communication*) yang berkelanjutan sehingga menemukan suatu pemahaman dan pengertian yang membentuk suatu kesadaran. Kesadaran ini akan terjadi pada pihak-pihak yang berdialog. Pihak-pihak tersebut bisa individu dalam masyarakat maupun individu pada lembaga pemerintahan. Setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan selalu dalam proses komunikasi dua arah (*two way communication*) dan selalu melakukan dialog dengan pihak lain.

Faktor kepemimpinan memegang peranan yang penting dalam suatu organisasi, karena pemimpin itulah yang akan menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sekaligus merupakan tugas yang tidak mudah. Tidak mudah, karena harus memahami setiap perilaku bawahan yang berbeda-beda, bawahan harus dipengaruhi agar memberikan pengabdian dan partisipasinya kepada organisasi secara maksimal. Kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, dan mempengaruhi orang lain, untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan (Edy Sutrisno, 2009:231).

Ambarita (2010:212) menyimpulkan bahwa kepemimpinan berpengaruh langsung positif terhadap komitmen organisasi. Untuk menumbuhkan komitmen organisasi, Gary Dessler (1982:2) mengemukakan sejumlah cara yang bisa dilakukan, satu di antaranya adalah “*provide extensive two-way communication*”, yaitu menjalin komunikasi dua arah di organisasi tanpa memandang rendah bawahan. Hal tersebut yang diterapkan menyusul adanya komitmen bersama segenap komponen masyarakat Kebumen yang diketahui para pemangku kepentingan dan alim

ulama. Dalam komunikasi dua arah tersebut, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi the *equalitarian style* dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang rileks, santai dan informal. Dalam suasana yang demikian, memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. Aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan kesamaan. *The equalitarian style of communication* ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah (*two-way communication*) (Wikipedia Bahasa Indonesia).

Memahami Perubahan

Menyusul adanya komitmen bersama segenap komponen masyarakat yang ditandatangani pada 17 Mei 2012 itu menandakan telah terjadi perubahan di Kebumen. Perubahan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan, berkaitan dengan ciri-ciri kehidupan suatu masyarakat atau sistem tertentu yang sebelumnya dengan segala konsekuensinya.

Pada konteks ini diperlukan sebuah perspektif komunikasi untuk dapat memahami perubahan yang dimaksud, dan di sinilah letak hubungan komunikasi dan perubahan. Seperti penjelasan Rogers (1983), "Komunikasi itu berfungsi untuk menjaga kestabilan yang merupakan syarat terjadinya perubahan, baik yang sepenuhnya dikendalikan dan direncanakan maupun tidak."

Begitu peliknya permasalahan ini hingga Rogers kembali mengemukakan pandangan kritisnya tentang pengaruh komunikasi pada perubahan. Analisisnya menyimpulkan bahwa komunikasi bukan satu-satunya penentu terjadinya perubahan, baik dalam diri kita maupun lingkungan sosial, melainkan ada faktor lain, yaitu faktor internal secara subjektif. Alasan yang dikemukakan Rogers adalah terdapat kontradiksi dan kekacauan pada analisis komunikasi dan sumber-sumber perubahan. Komunikasi ditafsirkan sebatas sebuah proses dari pencampuran isi pesan dengan potensi pertukaran pesan. Selain itu, pengertian komunikasi sendiri sendiri dimaknai sebatas saluran (media) dalam sistem sosial yang lebih besar, di mana peran kaum elit sangat dominan.

Lebih lanjut Rogers mengatakan bahwa perubahan yang terjadi, baik dalam diri maupun di luar diri kita, tidak serta merta disebabkan oleh persoalan komunikasi atau pesan-pesan komunikasi yang kita

terima.

Pandangan Rogers ada benarnya. Kompleksitas unsur-unsur yang terkandung dalam komunikasi mengakibatkan sukarnya menjelaskan dan mendefinisikan gejala, situasi, peristiwa, konteks dan tujuan komunikasi. Akibatnya, setiap peristiwa atau situasi komunikasi hanya dipandang sebagai sebuah proses dari unsur-unsur yang terpisah, bukan sebagai rangkaian atau kesatuan proses utuh yang berpengaruh terhadap perubahan. Padahal, memandang komunikasi sebatas ini hanya akan mempersempit ruang cakupan komunikasi itu sendiri.

John C. Condon dan Fathi Yoesef (dalam Mulyana, 2004) menjelaskan bahwa komunikasi melibatkan ekspektasi, persepsi, pilihan, tindakan dan penafsiran. Suatu alasan yang jelas, bahwa setuju atau tidak, manusia selalu memilih cara bertindak berdasarkan kerangka konsepsi yang dipahaminya melalui pertukaran pesan dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Setiap berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak, sesungguhnya kita sedang melakukan interaksi, interpretasi, dan pilihan atas pemaknaan setiap pesan yang kita terima. Artinya, apa pun bentuk komunikasi yang kita lakukan, dapat dipahami sebagai suatu tindakan, peristiwa, proses, dan seleksi, baik disengaja maupun tidak sebagai proses yang bersifat subjektif, tergantung cara kita menggunakannya. Dengan demikian, apa pun yang dikemukakan Rogers tentang peran komunikasi bagi perubahan, bukan berarti meniadakan fungsi dan kegunaan komunikasi.

Jika Rogers menyatakan kesangsiannya terhadap peran komunikasi pada perubahan, penguatan, dan pembentukan pikiran, perasaan, serta tindakan individu dan masyarakat, tidak demikian dengan pandangan pakar komunikasi lainnya. Mereka menyebutkan bahwa fungsi-fungsi yang dimiliki komunikasi dapat menjelaskan peran komunikasi bagi perubahan. Potensi pertukaran dan pemaknaan pesan (*sharing meaning*) yang berlangsung memungkinkan terjadinya konstruksi makna di antara komunikator dan komunikan. Pada tataran ini, komunikasi yang berlangsung bermuara pada munculnya kesadaran baru, baik langsung maupun tidak, atas apa yang kita ketahui dan pahami sebelumnya. Pada batas inilah komunikasi dipahami sebagai aktivitas dua arah yang humanis.

Hubungan proses komunikasi dan perubahan pada individu, kelompok dan masyarakat senantiasa saling memengaruhi dalam kondisi-kondisi tertentu. Jika komunikasi dipahami sebagai proses perubahan

dalam rangka pembangunan, sejatinya perubahan tersebut harus berorientasi kepada khalayak.

Harmoko (1985) mengemukakan pesan yang disampaikan kepada khalayak haruslah; *Pertama*, pesannya harus hangat / *actual* dan cocok dengan kepentingan khalayak. *Kedua*, pesannya harus menggugah hati khalayak, sehingga gagasan dan perasaan yang disampaikan oleh si pembawa pesan sudah seperti milik si penerima pesan sendiri. *Ketiga*, pesannya harus menimbulkan dorongan bertindak bagi khalayak secara spontan dan penuh kesan.

Academy of Educational Development (1985) merekomendasikan bahwa untuk efektivitas komunikasi dibutuhkan sebuah jaringan media. Melalui jaringan media, potensi jangkauan pesan kepada khalayak menjadi sangat luas dan beragam. Beberapa prinsip umum mengenai potensi saluran (media) komunikasi dewasa ini, yakni: media penyiaran (*broadcast media*), media cetak, media rakyat (*folk media*) dan komunikasi antarpribadi. Yang lebih penting dari ketiga hal tersebut di atas adalah mampu menjangkau khalayak dengan cepat, efektif, dan efisien. Melalui ketiga media ini, komunikasi yang efektif dapat diwujudkan dalam mempercepat proses sosialisasi ide pembangunan secara menyeluruh.

Karena itu, komitmen segenap komponen masyarakat Kebumen itu perlu dipublikasikan lebih lanjut ke seluruh masyarakat Indonesia, baik melalui media massa maupun media lainnya. Disarankan pula, salinan surat pernyataan tersebut diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Presiden Republik Indonesia.

Egosektoral dan Individualisme

Bupati Buyar Winarso mengatakan, tidak ada dasar aturan bagi dirinya untuk menandatangani kesepakatan bersama tersebut. Menyimak pandangan Osborne dan Gaebler (1992), bahwa organisasi publik yang dijalankan berdasarkan peraturan akan tidak efektif dan kurang efisien. Karena kinerjanya akan berjalan lambat dan terkesan bertele-tele. Tetapi birokrasi yang digerakkan oleh misi sebagai tujuan dasarnya akan lebih efektif dan efisien. Adanya peraturan dalam organisasi memang mempunyai tujuan yang baik, tetapi dalam banyak kasus, hal itu menyebabkan organisasi berjalan lambat serta kurang mampu merespon tuntutan lingkungan yang berubah dengan cepat. Dengan peraturan, orang tidak akan mampu melakukan apa yang menurut pandangannya benar, karena takut terkena sanksi jika ternyata ke-

tahuan mengabaikan atau melanggar aturan tersebut. Karena itulah mengapa banyak pegawai pemerintah yang apatis dan tidak kreatif, serta melupakan misinya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat.

Tjokrowinoto, (2011: 3) menjelaskan bahwa semangat *good governance* mensyaratkan hubungan yang harmonis antara Negara (*state*), masyarakat sipil (*civil society*) dan pasar (*market*). Jelaslah bahwa posisi strategis birokrasi dalam mewujudkan *good governance* yang merupakan suatu *condition sine qua non* bagi keberhasilan pembangunan. Karenanya, profesionalisme birokrasi merupakan persyaratan (*prerequisite*) mutlak untuk dapat mewujudkan *good governance* tadi.

Walau organisasi-organisasi lokal yang efektif memberi dampak yang positif dalam pembangunan yang lebih mandiri, mereka tetap membutuhkan komitmen dari pemerintah dan berbasis kekuasaan lainnya. Sebagaimana Uphoff dan Esman (dalam Melkote, 1991) memperingatkan, pemerintah haruslah memiliki komitmen terhadap pembangunan pedesaan yang seimbang melalui organisasi-organisasi lokal yang akan mampu menjembatani transfer sumber daya dari pusat ke daerah secara signifikan. Sebuah hal yang memang masih sulit diterapkan di berbagai Negara (Harun, 2011:226).

Begitu juga di Kabupaten Kebumen. SKPD cenderung lebih menonjolkan egosektoral dan individualism serta kurang profesional dan proporsional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Praktis, pembangunan di desa kurang diperhatikan. Beriman yang kepanjangannya bergeser menjadi Diberi, lalu Aman pun bukan lagi sekedar sindiran atau isapan jempol semata. Mengingat pembangunan saat ini sudah sangat materialistik.

Menurut Budiman (2000), pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok yaitu masalah materi yang mau dihasilkan serta dibagi dan masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif yang menjadi manusia pembangun. Para ahli ekonomi memang berbicara tentang sumber daya manusia (SDM), tetapi lebih menekankan aspek keterampilan sehingga manusia lebih dianggap sebagai faktor produksi dan lebih ditekankan pada peningkatan produksi saja. Sebaliknya proses-proses yang terjadi dalam diri individu serta bagaimana menciptakan kondisi lingkungan yang memungkinkan terjadinya manusia kreatif kurang diperhatikan dan dipermasalahkan.

Pembangunan tidak hanya berurusan dengan produk dan distribusi barang material namun juga harus menciptakan kondisi-kondisi yang membuat

manusia bisa mengembangkan kreativitasnya sebagai subjek pembangunan dan tidak sekedar sebagai objek pembangunan. Pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia yang kreatif. Hanya manusia seperti inilah yang bisa menyelenggarakan pembangunan dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Produktivitas dan distribusi hasil-hasil pembangunan yang digeluti oleh para ahli ekonomi hanya merupakan akibat dari pembangunan yang berhasil membangun manusia kreatif yaitu manusia pembangun. Untuk membentuk manusia pembangun, berbagai aspek seperti psikologi, sosiologi, politik, antropologi, dan budaya harus dilibatkan secara terpadu.

Pembangunan yang dilakukan di Indonesia dewasa ini masih tidak jauh dari konsep pembangunan, dimana faktor materi, kapital, dan produksi masih menjadi permasalahan utama yang menjadi perhatian. Sementara itu faktor-faktor nonmaterial seperti faktor internal individu dan lingkungan sosial kurang mendapat perhatian. Pembangunan tersebut telah terbukti mengalami kegagalan.

Hal ini bisa kita lihat dari situasi dan kondisi sosial ekonomi di Indonesia. Kondisi sosial saat ini diwarnai oleh berbagai konflik sosial dan keterbatasan kualitas SDM pembangun, sedangkan kondisi ekonomi diwarnai oleh krisis yang berkepanjangan yang belum menunjukkan titik terang. Kegagalan pembangunan tersebut tentunya harus dijadikan pelajaran bagi bangsa Indonesia untuk mencari alternatif model pembangunan yang lebih tepat bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan di Indonesia (Waskita, 2005). Termasuk di Kabupaten Kebumen yang memiliki slogan beriman sebagai landasan pembangunan daerah.

Penutup

Simpulan

Komitmen bersama segenap komponen masyarakat Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, merupakan konsep penyadaran untuk SKPD di lingkungan Pemkab Kebumen yang selama ini menonjolkan egosektoral dan individualism serta kurang profesional dan proporsional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga berimbas pada kurangnya perhatian terhadap pembangunan di desa.

Bupati Buyar Winarso yang disediakan tempat untuk membubuhkan tandatangan dalam surat pernyataan itu disarankan agar tidak ragu menandatangani, demi kepentingan masyarakat luas. Proses

penyadaran tersebut harus dilakukan melalui proses dialog. Sedangkan proses dialog merupakan proses komunikasi dua arah (*two way communication*) yang berkelanjutan, sehingga menemukan suatu pemahaman dan pengertian yang membentuk suatu kesadaran.

Komitmen bersama yang ditandatangani pada 17 Mei 2012 itu juga merupakan tonggak perubahan di Kabupaten Kebumen, sekaligus pijakan awal untuk mewujudkan pembangunan berbasis kearifan lokal, yakni Kebumen Beriman.

Saran

Komitmen Menyumbangkan Jiwa dan Raga dalam komunikasi pembangunan ini diharapkan, dalam memaknai beriman sebagai landasan pembangunan daerah itu tidak terdistorsi lagi oleh kepentingan sesaat. Dengan adanya komitmen bersama yang didukung oleh semua pihak tersebut, maka optimistis Kebumen Beriman bisa terwujud.

Daftar Pustaka

- Budiman, A. (2000). *Teori pembangunan dunia ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dilla, Sumadi (2010). *Komunikasi Pembangunan, Pendekatan Terpadu*. Bandung, Simbiosis Rekata-ma Media.
- Effendy, O.U. (2001). *Ilmu komunikasi: Teori dan praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Harun, Rochajat (2011). *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Iskandar (2010). *Sosiologi Komunikasi*. Pusat Pengembangan Bahan Ajar UMB.
- Rogers, Everett M. 1976. *Komunikasi dan Pembangunan : Perspektif Kritis*. Jakarta : LP3ES.
- Shoelhi, Mohammad (2012), *Propaganda dalam Komunikasi Internasional*. Bandung, Simbiosis Rekatama Media.
- Situmorang, Benyamin (2012). *Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan, Komunikasi Interpersonal, dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi Kepala Sekolah (Studi Kasus pada SMK di Kota Medan)*. Disertasi, Universitas Negeri Medan.
- Tjokrowinoto, Moeljarto (2011). *Birokrasi dalam Polemik*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Waskita, Djaka (2005). *Komunikasi Pembangunan untuk Pemberdayaan*. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Voume. 1, Nomor 1, Institut Pertanian Bogor.